



#2024
KKP BEYOND

2024

LAPORAN KINERJA



BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA

Email : bkipmjayapura@gmail.com

Jl. Pasir No. 06 Sentani - JAYAPURA

Kode Pos : 99352

Telp : (0967) 5191273





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jayapura (LKj Balai KIPM Jayapura) tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Jayapura dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Jayapura Tahun 2024. Secara umum, pada tahun 2024 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Jayapura di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Jayapura, 8 Januari 2025

Pt. Kepala Balai KIPM Jayapura



Mohammad Amin, SE., MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
1. CAPAIAN KINERJA	6
2. REALISASI ANGGARAN	11
BAB III PENUTUP	
KESIMPULAN	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator dan target kinerja Balai KIPM Jayapura Tahun 2024	4
Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Balai KIPM Jayapura Tahun 2024	6
Tabel 2. 2 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW III 2024	11
Tabel 2. 3 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW III 2024	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Aplikasi pengelolaan kinerja	6
--	---



RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jayapura pada 2024 adalah sebesar 109,090. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Jayapura yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Dari 14 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2024, pada terdapat 9 IKU yang pencapaiannya memenuhi target.

Uraian 6 IKU yang capaiannya memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Jayapura
2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM JayapuraSertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produkpada UPI Lingkup Balai KIPM Jayapura
3. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jayapura
4. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Balai KIPM Jayapura
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Jayapura
6. Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Jayapura
7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jayapura
8. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Jayapura
9. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Jayapura

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Balai KIPM Jayapura mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Jayapura dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Jayapura. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020, Bab I: Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Bagian Kesatu: Tugas dan Fungsi, Pasal 3: Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan system manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.; Pasal 4: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
- d. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- e. pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- f. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- h. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
- i. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

- j. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- l. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- m. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- n. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- o. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan
- p. pelaksanaan urusan ketatausahaan

3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi adalah sejumlah sasaran kegiatan yang terangkai dalam hubungan sebab akibat. Peta strategi dengan pendekatan BSC dibagi dalam 4 sasaran kegiatan yaitu kegiatan Karantina Ikan, Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif. Kegiatan Pengendalian Mutu, Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM, Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM.

Tabel 1. 1 Indikator dan target kinerja Balai KIPM Jayapura Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Balai KIPM Jayapura (%)	70
		3	Persentase Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	99
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Persentase implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	70
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Jayapura (Indeks)	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jayapura (Indeks)	86
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jayapura (Nilai)	82
		9	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	71
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (Nilai)	93,7
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	80

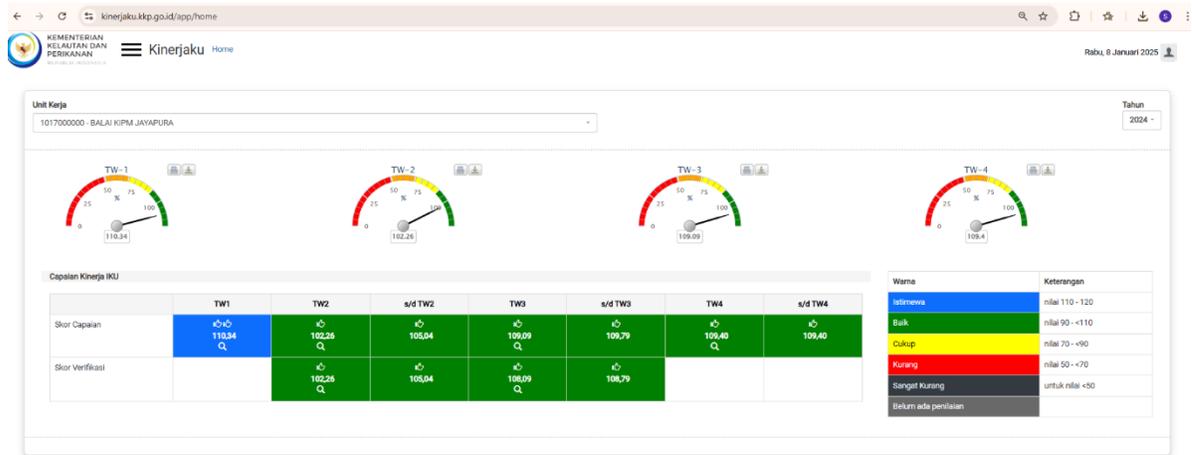
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	80

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Jayapura pada 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 108,88%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 1. 1 Aplikasi pengelolaan kinerja



Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Jayapura pada 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Balai KIPM Jayapura Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu			
SK1.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	70	
	2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Balai KIPM Jayapura (%)	70	
	3 Persentase Persentase pengawasan	70	

			mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Jayapura (%)		
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	99	
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Persentase implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	70	
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Jayapura (Indeks)	3,36	
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jayapura (Indeks)	86	
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jayapura (Nilai)	82	
		9	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	71	
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (Nilai)	93,7	
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	100	
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	80	
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	80	
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	80	

Sasaran Kegiatan

Kegiatan 1. Pengendalian Mutu

Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif

1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Jayapura

- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan Kesehatan dan mutu keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor.
- Bukti pengiriman hasil perikanan telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) di negara tujuan ekspor dan produk bermutu dan aman dikonsumsi

$$X = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{frekuensi ekspor} - \text{frekuensi penolakan oleh Negara tujuan}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

Total capaian 100 % karena Jumlah HC ekspor (KI-D1 yang memenuhi syarat kesehatan sama dengan jumlah Jumlah HC karantina ekspor yang diterbitkan demikian juga untuk HC ekspor mutu capaiannya 100 % karena jumlah Frekuensi HC ekspor yang memenuhi syarat mutu sama dengan jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan dan tidak ada penolakan dari negara tujuan.

2. Unit penanganan dan/atau pengelolaan ikan yang menerapkan system traceability Lingkup Balai KIPM Jayapura (UPI)

Ketertelusuran informasi asal bahan baku dan tujuan penggunaan bahan baku (adanya informasi yang akurat mengenai asal bahan baku yang dipergunakan oleh para pelaku usaha atau UPI)

Data berasal dari hasil verifikasi penerapan sistem ketertelusuran di UPI dan supplier (traceability), dengan tahapan:

- Pelaksanaan verifikasi

- Penyampaian hasil laporan verifikasi
- Evaluasi hasil verifikasi dan tindakan perbaikan
- Penerbitan sertifikat traceability bagi UPI dan supplier

Total capaian pada triwulan ke III adalah 100 %, dari target yang ditetapkan yaitu sampai triwulan ke III yaitu 1 UPI yang menerapkan system traceability Lingkup Balai KIPM Jayapura

3. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Jayapura

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pengukuran diukur dengan menghitung Σ ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan

PMMT/HACCP $A = B + C$

Ket :

B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi

Total capaian pada triwulan ke III adalah 3 produk dari target yang ditetapkan dari target yang ditetapkan pada triwulan ke III yaitu 1 produk atau 120 % Lingkup Balai KIPM Jayapura

Sasaran Kegiatan

Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan

Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif

1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Jayapura (nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey

SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa di masing-masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111 Jumlah Unsur 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 adalah indeks 3,68, target yang telah ditetapkan pada 2024 yaitu indeks 3,65.

2. Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)

- Memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri
- Menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri
- Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI
- Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI

$$\% \text{ Importasi} = \frac{A + B + C}{N}$$

Keterangan:

A : Laporan Importasi (30%)

B : Verifikasi dokumen importasi dan atau supervisi impor (35%)

Total capaian 100 %, sampai triwulan ke III tidak ada kegiatan impor pada Balai KIPM Jayapura

3. Lokasi usaha perikanan menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi Lingkup Balai KIPM Jayapura

Melaksanakan Verifikasi Quality Assurance (Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan/Standar dilokasi Kawasan/Kampung Budidaya.

Jumlah lokasi yang telah dilakukan Verifikasi Quality Assurance di lokasi/KawasanBudidaya.

Total capaian pada triwulan ke III adalah 1 lokasi dari target yang ditetapkan dari target yang ditetapkan pada triwulan ke III yaitu 1 lokasi atau 100 % Lingkup Balai KIPM Jayapura

Sasaran Kegiatan

Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP

3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Jayapura (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan 1 tahun 2024 s.d Triwulan 3 Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM yang menjadi objek pengawasan

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$$

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I

ΣN : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Jayapura pada Tahun 2024 mencapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 80%

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan 13 (tiga belas) variable yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Jayapura yang telah dicapai pada adalah 84,48 % atau telah melabihi target yang telah ditetapkan yaitu 83,00 %

Alokasi anggaran Balai KIPM Jayapura pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah Rp. 4,751,708,000,-

Pada 2024, realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Jayapura mencapai Rp. 3,104,153,874,- atau sebesar 65.33%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Jayapura T.A 2024 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW III 2024

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TW III	%
1	Belanja Pegawai	2.280.716.000,-	1.750.391.457,-	54,79
2	Belanja Barang	2.470.992.000,-	1.353.762.417,-	54,79
3	Belanja Modal	0	0	0
TOTAL		4.751.708.000,-	3.104.153.874,-	65,33

Tabel 2.3. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW III 2024

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi TW III	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	4.383.708.000,-	2.976.190.733,-	67,89
2	Pengendalian Mutu	210.000.000,-	56.630.231,-	26,97
3	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	158.000.000,-	71.332,910,-	45.15
TOTAL		4.751.708.000,-	3.104.153.874,-	65,33

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Jayapura 2024 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Balai KIPM Jayapura pada periode awal tahun anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Jayapura yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Jayapura pada - 2024, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain:

- Penanggungjawab kegiatan (IK/IKU) beserta Sub Koordinator agar lebih cermat dalam menentukan target dan capaian per triwulan sehingga peluang terjadinya anomali dan persentase capaian dibawah 100% dapat diminimalisir.
- Tim Manajemen Kinerja Balai KIPM Jayapura agar lebih cermat dan teliti dalam menyusun Manual IKU, Rincian Target, Rencana Aksi, dan dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja lainnya.